

**ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

TESIS

Oleh:
RINI OCTAVIANI
06 206 127



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2008**

**ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Oleh : Rini Octavianti, ST

Dibawah Bimbingan 1. DR. Hefrizal Handra, 2. Prof. DR. Sofyardi, SE, MA

RINGKASAN

Penelitian ini terkait dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2003 untuk meningkatkan sumberdaya manusia sebagai pengelola pembangunan melalui pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Solok Selatan. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas telah dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran. Dokumen tersebut harus terjamin konsistensinya, yang merupakan salah satu penilaian yang dilakukan pemerintah baru-baru ini dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang APBD tahun anggaran 2008. Masalah penelitian ini adalah apakah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan mampu menjawab permasalahan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan dan apakah terdapat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan.

Metode analisis yang dipakai adalah Analisis *SWOT* serta penyusunan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP). Hasil wawancara serta observasi lapangan menunjukkan permasalahan internal dapat diurai antara lain; partisipasi pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, nilai ujian nasional, sarana dan prasarana dan peranan dinas pendidikan. Sedangkan permasalahan eksternal antara lain; komitmen stakeholder terkait pendidikan, kebijakan pemerintah bidang pendidikan, perubahan kondisi ekonomi, partisipasi masyarakat. Penyusunan MKPP dengan integrasi dari dua dokumen yang saling berkaitan yakni : Analisis antara dokumen RPJPD dengan RPJMD kurang menunjukkan konsistensi. Secara kuantitatif hanya sekitar 50% program-kegiatan di RPJMD sinkron dengan program-kegiatan di RPJPD, Analisis antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD-Dinas Pendidikan konsistensi digambarkan dengan angka sekitar 75%, Analisis antara dokumen Renstra SKPD dengan Renja SKPD menunjukkan konsistensi dengan angka 100%. Analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran dokumen Renja dan APBD bidang Pendidikan Dasar berdasarkan sinkronisasi nomenklatur dan deviasi budgeting, terdapat program dan kegiatan yang konsisten adalah sekitar 60%. Sedangkan program dan kegiatan yang tidak konsisten adalah sekitar 40%. Untuk bidang Pendidikan Menengah analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran dokumen Renja dan APBD berdasarkan sinkronisasi nomenklatur dan deviasi budgeting, terdapat program dan kegiatan yang konsisten adalah sekitar 25%. Sedangkan program dan kegiatan yang tidak konsisten adalah sekitar 75%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah otonom baru yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Solok berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 2003. Sebagai daerah otonom baru daerah ini memiliki keterbatasan sumberdaya manusia yang kompeten dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya dunia pendidikan di kabupaten ini.

Menyadari pentingnya pendidikan dalam peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok Selatan, maka harus disikapi dengan serius perencanaan dan penganggarannya. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang erat kaitannya. Agar perencanaan dan penganggaran bersifat realistik dan tepat sasaran maka perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah yang menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka rencana dan anggaran.

Kecenderungan selama ini menunjukkan bahwa perencana cenderung melupakan dokumen-dokumen dalam perencanaan dan penganggaran. Misalkan pembiasaan penggunaan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) serta dokumen perencanaan pendidikan yakni Rencana Strategis Pendidikan (RENSTRA Pendidikan) dan Rencana Kerja Pendidikan (RENJA Pendidikan).

Sebagai isu baru-baru ini, yakni terpilihnya Propinsi Papua sebagai juara pertama dalam penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008. Penilaian sebagai juara didasarkan pada konsistensi antara RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas, Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD, sehingga terjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran (Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Papua, 2007).

Untuk terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang konsisten dimana berbagai fenomena pendidikan di Kabupaten Solok Selatan yang membutuhkan perhatian khusus antarlain permasalahan tentang kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang tidak merata mempengaruhi keseimbangan jumlah sekolah, masalah tersebut akan menghambat upaya pemerataan pendidikan di Kabupaten Solok Selatan. Permasalahan lain yakni ketersediaan aksesibilitas hingga ke daerah-daerah yang terisolir dan tertinggal, padahal secara demografi daerah tersebut memiliki jumlah usia sekolah yang banyak. Hal ini akan berdampak pada tingginya angka putus sekolah di Kabupaten Solok Selatan. Masih banyak permasalahan bidang pendidikan lainnya di Kabupaten Solok Selatan yang tidak terakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan pendidikan.

Adanya indikasi tidak terkaitnya perencanaan dan penganggaran terlibat dari hanya dilakukan pendekatan parsial yang lebih mengedepankan egoisme sektoral dan dominasi pemerintah, sedangkan keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pendidikan, ketidakselarasan

antara perencanaan dan penganggaran pendidikan, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan dan program pembangunan pendidikan masih rendah. Meskipun forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, termasuk menyelenggarakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Forum SKPD) telah dilakukan, namun masih belum efektif dalam menyalurkan aspirasi *stakeholder* terkait bidang pendidikan, hal ini masih kuatnya egoisme sektor pemerintahan. Minimnya ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran masih belum terbuka. Demikian juga dalam proses penganggaran pada rapat koordinasi tim anggaran. Bahkan akuntabilitas hanya dilihat dari sisi laporan pertanggungjawaban atau implementasi anggaran, tidak ada mekanisme akuntabilitas pada tahap perencanaan anggaran, dikarenakan pelembungan anggaran yang direncanakan diawali pada proses perencanaan.

Oleh karena itu sangat penting adanya keterkaitan perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan yakni sesuai tuntutan masa depan akan pentingnya menyiapkan perencanaan dan penganggaran selain merupakan instrumen kebijakan dan pengalokasian anggaran untuk penanggulangan kebutuhan dan prioritas belaka, juga menjadikan perencanaan dan penganggaran benar-benar menjadi program kerja yang ditaati dalam sistem manajemen pendidikan nasional. Proses perencanaan yang efektif senantiasa harus memperhatikan isu-isu yang berkembang di daerah, di tingkat nasional, regional,

dan bahkan global, serta daya saing, perkembangan sistem informasi, perkembangan demografi, dan kualitas sumber daya manusia.

Perencanaan dan penganggaran merupakan instrumen untuk mencapai maksud dan tujuan pendidikan nasional dengan mengoptimalkan segala kemampuan sumber daya yang tersedia. Untuk itu, setiap kegiatan diorientasikan kepada upaya perwujudan kinerja (*performance*) yang secara berangsur-angsur terus meningkat. Maka dari itu penyusunan program dan anggaran harus transparan, adil, efektif dan efisien dan harus berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada. Tanpa adanya kerangka strategi, pedoman, tidak mungkin menyusun rencana kerja dan anggaran kinerja secara baik. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengalokasian anggaran yang tidak semestinya sesuai dengan tuntutan terhadap paradigma *good governance* dan *clean government* yang mengharapkan terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik dan bersih.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, khususnya penyelenggaraan kebijakan desentralisasi pendidikan, sangat dibutuhkan perencanaan pembangunan pendidikan dengan keterbatasan anggaran dalam rangka peningkatan kinerja pendidikan yakni pemerataan dan perluasan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan serta meningkatkan kinerja manajemen internal pendidikan.

Pemerataan dan perluasan pendidikan berimplikasi pada semua penduduk usia sekolah di Kabupaten Solok Selatan akan mendapat pendidikan yang layak sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pendidikan. Kinerja peningkatan mutu dan relevansi pendidikan berimplikasi pada kualitas angkatan kerja yang tersedia di Kabupaten Solok Selatan. Sebagai contoh, saat ini angkatan

kerja yang ada masih didominasi oleh lulusan SD dan tidak tamat SD. Sementara, angkatan kerja lulusan SMA dan sederajat atau akademi dan sederajat masih sangat sedikit (kurang dari 1%). Sedangkan kinerja peningkatan manajemen internal pendidikan berimplikasi pada peningkatan manajemen pada instansi pendidikan. Pada akhirnya kinerja tersebut bermuara pada pencapaian pendidikan yang bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak.

Fenomena pendidikan diatas hanya sebagian kecil dari berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Solok Selatan, dengan bertitik tolak dari permasalahan, dirasa perlu melakukan suatu penelitian tentang “Analisis Konsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Solok Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang diarahkan sebagai berikut:

1. Apakah dokumen perencanaan dan penganggaran di bidang pendidikan dasar dan menengah telah meminimalisir permasalahan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan ?
2. Sejauh apakah terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran bidang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan ?

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Solok Selatan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan pendidikan dasar dan menengah telah teridentifikasi dari hasil wawancara langsung dan pengamatan lapangan. Dengan mengelompokkan permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal antara lain; partisipasi pendidikan, alokasi anggaran pendidikan, kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan, nilai ujian nasional, sarana dan prasarana dan peranan dinas pendidikan. Sedangkan permasalahan eksternal antara lain; komitmen stakeholder terkait pendidikan, kebijakan pemerintah bidang pendidikan, perubahan kondisi ekonomi, partisipasi masyarakat.
2. Penyusunan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran, dengan integrasi dari dua dokumen yang saling berkaitan yakni ; Analisis antara dokumen RPJPD dengan RPJMD (kurang menunjukkan konsistensi. Secara kuantitatif hanya sekitar 50% program-kegiatan di RPJMD sinkron dengan program-kegiatan di RPJPD, dikarenakan RPJMD tidak membahas secara rinci program untuk SKPD dinas pendidikan), Analisis antara dokumen RPJMD dengan Renstra SKPD-Dinas Pendidikan (konsistensi digambarkan

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. **Pengantar Studi Penelitian Kebijakan**. Jakarta : Bumi Aksara
- Danim, Sudarwan. **Menjadi Peneliti Kualitatif**. Ancangan Metodologi, presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. Bandung : Pustaka Setia
- ×Ghozali, Abbas, dkk, **Analisis Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah**. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 2004
- Indra Bastian, 2006. **Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar**. Jakarta
- Indriati, Etty. **Menulis Karya Ilmiah : Artikel, Skripsi, Tesis dan Disertasi**
- M. Chan, Sam dan T.Sam, Tuti, 2005. **Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah**. Jakarta, Jayagrafindo Persada.
- Mardiasmo, 2002. **Akuntansi Sektor Publik**. Jakarta
- Matthew B, Huberman M. **Analisis Data Kualitatif**. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta : Universitas Indonesia
- Mulyadi, 2005, **Sistem manajemen Strategik Berbasis Balanced Scorecard**, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nazir, M.1985. **Metode Penelitian**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rangkuti, F. 2003. **Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis**. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. **Perencanaan Pembangunan**. Jakarta : Gunung Agung
- Wheelen, T. L. & Hunger J.m D., 2000, **Strategic Management and Business Policy**, New York: Addison-Wesley Company, Inc.
- Wajah Pendidikan Bangsa : Hasil Survey Pendidikan Nasional 2003 Tingkat Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 2005
- RPP tentang Wajib Belajar**. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 2005
- RPP tentang Pengelolaan dan Pendanaan Pendidikan**. Jakarta : Balitbang, Depdiknas, 2005
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional**. Bappenas, 2004.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Balitbang, Depdiknas, 2003